# DINAMIKA SOSIAL DAN LINGKUNGAN P. JAWA

## I. LATAR BELAKANG

Interaksi manusia dengan lingkungan di P. Jawa dapat diungkap melalui penemuan manusia purba di Mojokerto *(Homo mojokertensis*), bersama-sama dengan fosil hewan dan tanaman yang diperkirakan hidup 1,8 juta tahun yang lalu. Kemudian pada tahun l891 E. Dubois dan von Koeningswald menemukan manusia purba berbadan tegak*, Pithecantropus erectus* di Trinil, Jawa Timur dan pada tahun l931-l933, von Koeningswald menemukan *Pithecantropus soloensis* di Ngandong, Sangiran. Menurut para ahli, manusia purba hidup secara berkelompok kecil dan dengan menggunakan teknologi sederhana mereka berburu dan mengumpulkan bahan makanan, antara lain berupa umbi-umbian, ikan dan hewan buruan. Jumlah populasi yang rendah dan tersebar telah memberikan dampak yang relatif kecil terhadap daya dukung lingkungan.

Keadaan tersebut berbeda dengan saat ini. Statistik Lingkungan l998 menyebutkan bahwa P. Jawa dengan luas sekitar 6,89% dari luas total Indonesia dihuni lebih dari 120 juta orang atau sama dengan 58%. Untuk itu Jumlah penduduk dengan kebiasaan dan gaya hidup serta ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah melampaui daya dukung lingkungan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah konseptual dan operasional untuk menyelamatkan P.Jawa agar terhindar dari berbagai bencana lingkungan yang dapat mengganggu integritas negara kesatuan Indonesia. Karena besarnya jumlah penduduk dan kedudukan P. Jawa sangat strategis maka dinamika berbagai persoalan yang terjadi mempengaruhi situasi Indonesia secara keseluruhan, termasuk krisis multidimensional.

## II. SITUASI INDONESIA

Sampai dengan saat ini Indonesia masih dilanda multikrisis yang bercirikan saling kait mengkait, rumit dan penuh ketidakpastian yang memberikan dampak pada semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, untuk memahami persoalannya tidak mudah dan cepat. Akan tetapi pada umumnya multikrisis tersebut secara umum dapat berasal dari 5 (lima) persoalan utama yang saling kait mengkait, yaitu :

1) merebaknya konflik sosial dan munculnya gejala disintegrasi bangsa
2) lemahnya penegakan hukum dan hak azasi manusia
3) lambannya pemulihan ekonomi
4) rendahnya kesejahteraan rakyat, meningkatnya penyakit sosial dan lemahnya ketahanan budaya
5) meningkatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan

Banyak faktor yang menyebabkan munculnya krisis multidimensional antara lain karena di masa silam terjadi praktek pemerintahan yang sentralistik ditandai dengan kekuatan eksekutif yang sangat dominan dibanding dengan legislatif dan kurang memberi ruang pada masyarakat dan daerah untuk berperan serta dalam proses pembangunan. Karena tidak ada "check and balance", maka keadaan tersebut telah menimbulkan berbagai kekeliruan kebijakan, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum. Hal ini menimbulkan reaksi mendasar, berupa desakan reformasi penyelenggaraan negara. Di beberapa tempat, tuntutan ketidakpuasan dan keputusasaan itu diwujudkan dengan adanya berbagai konflik sosial dan gejolak disintegrasi bangsa, seperti yang terjadi di Aceh dan Irian Jaya.

Lemahnya penegakan hukum dan hak azasi manusia ikut memperburuk krisis. Hal ini disebabkan karena pengembangan sistem hukum belum dilaksanakan secara komprehensif dan belum diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalitas aparat penegak hukum. Selain itu, tekad untuk memberantas KKN pada kenyataannya belum menunjukkan hasil yang cukup berarti. Kesemua itu menimbulkan rasa ketidakadilan dan tidak adanya jaminan hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan supermasi hukum.

Lambannya pemulihan ekonomi mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat, sehingga menambah jumlah penduduk yang berada dibawah kemiskinan, baik di perkotaan dan di pedesaan, makin lebarnya jurang kaya dan miskin, meningkatnya urbanisasi. Pengganguran pada saat ini diperkirakan sebanyak 40 juta orang. Pengangguran dan kemiskinan berpotensi meningkatkan gangguan sosial, menurunkan kualitas kesehatan dan berpotensi rendahnya kesehatan dan intelektualitas generasi yang akan datang.

Krisis juga menurunkan kesejahteraan rakyat, baik material dan spiritual. Persoalan nyata di masyarakat antara lain berupa terjadinya dekadensi moral, banyaknya anak putus sekolah dan gelandangan, menurunnya kualitas pendidikan dan kesehatan serta ketidakpuasan masyarakat yang berpotensi melakukan tindak "main hakim sendiri" dan menimbulkan kerusuhan sosial antara kampung dan antar etnis. Merebaknya penyakit sosial juga

ditunjukkan dengan meningkatnya KKN, kriminalitas, pemakaian obat terlarang, perilaku menyimpang yang melanggar etika dan moralitas.

## III. PERSOALAN LINGKUNGAN P.JAWA

Banyaknya gunung api andesit dan iklim tropis mempercepat proses pelapukan. Iklim tropis dan produk volkanik yang sebagian besar terdiri dari bahan lepas memberikan tanah-tanah pertanian subur. Tanah yang subur dan ketersediaan air menjadi faktor penarik untuk menghuni P.Jawa. Hal ini antara lain menjadi faktor penentu munculnya peradaban sejak manusia purba dan berbagai kerajaan seperti Majapahit, Mataram Hindu, sampai dengan zaman kolonial, yang lebih banyak mengeksploitasi hasil pertanian dan perkebunan.

Dalam perkembangannya P. Jawa tidak hanya digunakan tanah pertanian yang subur, akan tetapi menjadi pusat berbagai kegiatan ekonomi dan industri, perdagangan, pemerintahan, pariwisata, pendidikan dan lain-lain, sehingga telah mengakibatkan kesenjangan pembangunan antara P.Jawa dan Luar Jawa. P. Jawa bagaikan gula yang menarik para semut untuk berdatangan.

Pada tahun l970-an, para ahli telah memperkirakan bahwa P.Jawa akan tenggelam, karena memang telah mengalami beban lingkungan yang berlebihan dikarenakan jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan yang padat. Jumlah penduduk dengan segala aktifitasnya, termasuk pembangunan telah meningkatkan kebutuhan akan bahan makanan, udara dan air bersih serta lahan yang telah melampaui daya dukung lingkungan.

Arus migrasi dan urbanisasi yang tinggi telah mengakibatkan pertumbuhan berbagai kota besar yang sangat cepat, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan lain-lain telah menimbulkan berbagai persoalan dari mulai perumahan kumuh, banjir, polusi kendaraan bermotor, limbah domestik, termasuk sampah, intrusi laut dan berbagai persoalan sosial, seperti gelandangan, kriminalitas, kesehatan, keamanan, pendidikan. Kebijakan perluasan permukiman di kota besar, seperti Jakarta dengan Jabotabek, Bandung Raya, Gerbang Kertasusila telah menimbulkan berbagai persoalan lingkungan pada daerah "hinterland". Dampak lingkungan tidak hanya terjadi pada kota-kota tersebut. Akan tetapi telah mempengaruhi daerah sekitar. Dalam banyak hal telah menimbulkan dampak lingkungan pada skala regional dan bahkan global, seperti penipisan lapisan ozon, perubahan iklim, yang diikuti dengan peningkatan muka air laut, pencemaran udara dan air lintas batas.

Pengurangan beban kepadatan permukiman ke daerah pinggir kota, yang pada mulanya masih hijau dan nyaman, pada saat ini telah menimbulkan kesulitan karena kemacetan lalu lintas menuju ke pusat kota telah menimbulkan kerugian ekonomi dan peningkatan emisi udara yang mengganggu kesehatan.

Sekalipun Otonomi Daerah dapat menjamin pemerintahan yang desentralistik dan demokratis, akan tetapi euforia Otonomi Daerah juga telah memperburuk kondisi lingkungan, karena pada umumnya masing-masing kabupaten dan kota belum memberi perhatian terhadap pengelolaan lingkungan yang memadai dan ingin meningkatkan PAD dari sumber daya alamnya. Disamping itu, dalam hal tertentu, era reformasi diartikan oleh masyarakat sebagai era kebebasan, termasuk bebas untuk merambah dan menjarah sumber daya alam. Jika hal ini tidak segera diantisipasi, maka berbagai bencana lingkungan akan mengancam kehidupan manusia.

Peningkatan persoalan lingkungan terjadi juga pada tingkat ekosistem P. Jawa, antara lain seperti pencemaran air, udara, laut, air tanah dan tanah, limbah perkotaan (rumah tangga, industri dan rumah sakit) limbah B3, kerusakan pesisir dan laut serta keanekaragaman hayati, kebakaran hutan, kerusakan lahan, kemerosotan kualitas kawasan konservasi dan banjir dan longsor serta kerusakan daerah aliran sungai.

Sebenarnya berbagai persoalan lingkungan sudah kita kenali cukup lama, bahkan telah pula dikembangkan berbagai kebijakan, strategi dan kegiatan prioritasnya. Akan tetapi nampaknya antara persoalan dengan upaya untuk mengatasinya tidak seimbang, sehingga sampai dengan saat ini belum ada hasil yang menggemberikan dalam pengelolaan lingkungan P. Jawa. Bahkan yang terjadi kondisi lingkungan, seperti hutan, air dan pesisir semakin rusak dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan perlu dicarikan upaya-upaya percepatan yang lebih holistik dengan melibatkan pihak yang berkepentingan. Dengan mempelajari berbagai persoalan lingkungan yang ada secara sistemik, maka langkah-langkah untuk mengatasi persoalan lingkungan tidak dapat dipisahkan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan.

## IV. KONFLIK LINGKUNGAN = KONFLIK SOSIAL

Sejak manusia mendiami planet Bumi, persoalan lingkungan muncul sebagai akibat konflik antara manusia, baik secara individu maupun kelompok. Ada ciri yang membedakan terjadinya konflik tersebut. Di masa lalu, konflik

lingkungan lebih sederhana, tidak beragam dan bersifat lokal serta lebih banyak terjadi karena pengaruh alam, sedangkan pada saat ini, selain telah tumbuh kesadaran lingkungan global, akan tetapi konflik lebih beragam, rumit, cepat berubah dan penuh ketidakpastian serta banyak terjadinya karena kombinasi faktor alam dan perilaku manusia, secara individu dan sosial

Konflik lingkungan yang terjadi di P.Jawa sangat erat hubungannya dengan manusia, baik peran dan kedudukannya sebagai mahluk individu maupun mahluk sosial. Dan manusia memiliki dua dimensi yang melekat pada dirinya, yaitu sebagai pelestari lingkungan sekaligus sebagai perusak lingkungan. Sebagai mahluk individu, manusia memiliki kemandirian yang ditunjukkan dengan kemampuannya untuk berpikir, bersikap dan bertindak sendiri. Kemandirian ini berpotensi menimbulkan sifat individualistik, egoistik, altruistik, dan sifat-sifat lainnya. Oleh karena itu, selain sangat beragam, rumit, cepat berubah dan penuh ketidakpastian, maka persoalan lingkungan memiliki ciri-ciri konflik kepentingan antar manusia, baik secara vertikal maupun horizontal.

Di sisi lain, manusia memiliki peran dan kedudukan sebagai mahluk sosial yang cenderung saling membutuhkan satu sama lain. Sifat ini mendorong manusia untuk membentuk komunitas, yang diwujudkan dengan hasrat manusia untuk membina keluarga, RT,RW, kelurahan dan kecamatan, organisasi politik, agama dan kemasyarakatan, bahkan sampai berbentuk suatu negara. Antar negara juga bertekad membentuk organisasi regional dan global.

Akan tetapi diantara komunitas-komunitas yang terkecilpun memiliki potensi konflik kepentingan, dari mulai persoalan sampah rumah tangga, rusaknya daerah aliran sungai sampai perubahan iklim dan penipisan lapisan ozon. Kesemuanya terjadi dari konflik individu, kelompok, pengusaha dan masyarakat. Disamping itu konflik lingkungan terjadi di tingkat global antara negara maju dan negara berkembang.

Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya, baik secara individu maupun kelompok. Konflik dapat terjadi karena perubahan-perubahan sosial yang cepat karena adanya perubahan sistem yang berlaku. Selain itu, konflik terjadi karena hilangnya rasa menghargai norma-norma adat dan tradisi yang ada di masyarakat dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Bentuk-bentuk konflik lingkungan dapat berupa pertentangan individu, kelas, sosial, etnis dan konflik internasional yang kesemuanya berakibat rusak dan cemarnya lingkungan.

Mengenali masyarakat P. Jawa pada saat ini tidak mudah. Sekalipun pada mulanya bersumber dari 4 (empat) suku besar, yaitu Jawa, Sunda dan Madura dan terdiri dari sub-sub sistem, seperti masyarakat pesisir dan masyarakat pedalaman atau masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Akan tetapi karena kemudahan perhubungan dan banyak kegiatan pembangunan di Jawa, maka masyarakat P. Jawa telah mengalami perubahan sosial yang cepat. masyarakat P. Jawa yang majemuk tidak statis, tetapi dinamis, telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Apabila perubahan itu melebihi ketahanan sosialnya untuk menyesuaikan diri, maka akan berakibat buruk terhadap masyarakat dan lingkungannya, demikian sebaliknya. Disamping itu, ketahanan sosial dan budaya sangat bergantung pada lokasi dan nilai-nilai budaya setempat, sehingga tanggapan terhadap perubahan akan berbeda dari lokasi satu ke lokasi lainnya.

Pembangunan di P.Jawa pada dasarnya perubahan. Jika tidak diantisipasi dengan berbagai pertimbangan termasuk ketahanan sosial budaya, maka pembangunan yang berupaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai. Dari berbagai penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial budaya dapat dilihat dari berbagai unsur, yaitu 1) pranata sosial, 2) nilai, sikap dan persepsi, 3) distribusi kekuasaan, 4) struktur stratifikasi sosial, 5) peran, 6) integrasi/keserasian, 7) hubungan dengan lokasi lain, 8) pengalaman dengan perubahan, 9) jenis masalah sosial, 10) kesehatan lingkungan, 11) penggunaan sumber daya, 12) lingkungan binaan, 13) jumlah penduduk, 14) kepadatan penduduk, 15)jarak dengan kota, 16) pendapatan, 17) pola perubahan penduduk, dan 18) pola keanekaragaman penduduk.

## V. LANGKAH-LANGKAH PENYELAMATAN P. JAWA

### 5.1. Kebijakan

Dinamika sosial dan lingkungan P. Jawa tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan yang senantiasa dikembangkan perlu mengintegrasikan ketiga komponen Pembangunan Berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Dengan kata lain, keadaan yang ingin dicapai adalah pertumbuhan, efisiensi dan stabilitas ekonomi yang mengintegrasikan pertimbangan ketahanan lingkungan dan meningkatkan kemiskinan, sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat.

Mengingat persoalan P.Jawa adalah antara manusia dan lingkungan, maka kebijakan tersebut perlu diimplementasikan oleh masyarakat yang berkelanjutan (Sustainable Society), yaitu masyarakat yang secara sadar dan mampu menentukan langkah-langkah dengan memperhatikan keseimbangan,

keserasian dan keselaran antara dinamika manusia dengan daya dukung lingkungan, yaitu kemampuan lingkungan untuk mengasilimilasi limbah, menyediakan bahan baku industri, dan bahan makanan dan memenuhi berbagai kebutuhan lainnya. Masyarakat inilah yang secara sadar memperhatikan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang. Masyarakat berkelanjutan dapat terwujud berdasarkan 2 (dua) prinsip, yaitu prinsip etika dan prinsip operasional.

Prinsip etika menyebutkan 3 (tiga) hal utama. *Pertama*, sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak tanpa batas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendayagunaan yang bijaksana. *Kedua*, Manusia adalah bagian dari lingkungan, tidak ada kekecualian terhadapnya. Jika kita melanggar kaidah lingkungan, maka akan menerima resikonya. *Ketiga*, manusia tidak harus mendominasi alam, akan tetapi belajar untuk berkawan dengan kekuatan-kekuatannya.

## 5.2. Program Prioritas

Selain itu perlu dilaksanakan 5 program prioritas, yaitu inventarisasi dan evaluasi potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup, konservasi, daur ulang, sumber daya alam terperbaharui dan pengendalian penduduk.

**Inventarisasi dan evaluasi potensi sumber daya alam dan lingkungan.** Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan potensi berbagai sumber daya alam dan lingkungan di berbagai tempat, kabupaten, kota dan propinsi di P.Jawa disertai dengan daya dukung. Kegiatan ini menjadi dasar untuk melakukan program selanjutnya.

**Konservasi** berarti mengurangi konsumsi yang tidak perlu atau berlebihan. Ini berarti menjadi konsumen yang hanya membeli barang awet dan secukupnya. Konservasi juga berarti menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Disamping masih banyak masyarakat belum menikmatinya, pada saat ini kita cenderung memboroskan energi listrik, air, kertas, makanan. Padahal ini semua jika dihemat dapat mengurangi pencemaran, dan kerusakan lingkungan serta dibagi kepada masyarakat yang membutuhkannya. **Daur ulang** berarti menggunakan barang berulang, sehingga dapat menghemat energi dan mengurangi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pada saat ini, kita mengandalkan TPA yang terpusat untuk mengatasi persoalan sampah kota-kota besar. Padahal kita tahu, persoalan sampah dapat dikurangi dari sumbernya, yaitu kegiatan rumah tangga dan dalam kandungan sampah terdapat kaca, gelas, aluminium, plastik dan lain-lain yang dapat didaur ulang.

**Sumber daya alam terperbaharui** seperti pohon, tanaman, dan sumber daya laut perlu mendapat perhatian. Berbeda dengan sumber daya alam tak terperbaharui, maka sumberdaya alam terperbaharui tidak akan habis, asal pemanfaatannya masih dalam batas untuk memperbaharui diri.

**Pengendalian penduduk** berarti P. Jawa harus diperhatikan dari jumlah penduduk, dan persebarannya. Pengendalian penduduk termasuk berbagai upaya untuk mengurangi konsentrasi penduduk yang berlebihan, sehingga akan memberikan berbagai dampak lingkungan. Migrasi dan keluarga kecil juga menjadi factor penentu terhadap terjadinya persoalan lingkungan.

## 5.3. Tata Praja Lingkungan

Bagaimana Masyarakat berkelanjutan mampu mendorong pengelolaan lingkungan lebih transparan, partisipatif dan akuntabel ?. Membangun masyarakat berkelanjutan perlu dilakukan oleh setiap individu, kelompok, organisasi baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam desentralisasi pengelolaan lingkungan, yang berarti bahwa kewenangan pengelolaan lingkungan hidup sudah lebih banyak di daerah, maka masyarakat berkelanjutan harus mendorong mekanisme pengambilan keputusan politik di pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien.

Untuk itu, semua pihak perlu menyadari bahwa dalam proses pengambilan keputusan politik di daerah, maka terdapat 4 (empat) aktor utama, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, DPRD dan Kaukus Lingkungan atau lembaga masyarakat semacam "parliament watch". Pengambilan keputusan yang berisi tentang kebijakan, program, implementasi, monitoring dan evaluasi perlu senantiasa diusahakan agar mengintegrasikan pertimbangan lingkungan.

Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan adalah mendorong masyarakat, sebagai "demand side" agar mampu memiliki inisiatif untuk menuntut lingkungan agar menjadi baik. Dalam pada itu, tuntutan itu perlu ditanggapi dan diperhatihkan oleh pihak pemerintah daerah, sebagai supply side. Diantara masyarakat dan pemerintah daerah perlu ada DPRD yang memiliki kemampuan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Hasil akhir dari mekanisme ini adalah lingkungan sudah menjadi mekanisme "demand dan supply" di tingkat pemerintah daerah, sehingga lingkungan dengan sendirinya mendapatkan tempat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan daerah.

## VI. PENUTUP

P. Jawa dengan luas 6,89% dari luas total dihuni lebih dari 120 juta orang atau 58% telah menjadi pusat kegiatan ekonomi, industri dan perdagangan, pendidikan, pemerintahan, dan sosial budaya.

Kepadatan penduduk dengan segala aktifitasnya telah melebihi daya dukung lingkungan P.Jawa, sehingga telah mengakibatkan berbagai persoalan lingkungan, seperti perumahan kumuh, sampah, emisi kendaraan bermotor, pencemaran air tanah, intrusi air laut, banjir, pencemaran industri, kerusakan daerah aliran sungai, hilangnya kawasan lindung, yang tidak hanya berskala local, tetapi regional bahkan global. Persoalan lingkungan di Jawa sangat erat kaitannya dengan kepadatan penduduk dengan segala aktifitasnya.

Langkah-langkah penyelamatan P. Jawa didasarkan pada Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang dijalankan oleh masyarakat yang berkelanjutan (Sustainable Society), dengan program prioritas, yaitu inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam dan lingkungan, konservasi, daur ulang, sumber daya alam terperbaharui, pengendalian penduduk. Langkah-langkah ini diikuti dengan mekanisme pengambilan keputusan politik Tata Praja Lingkungan (Environmental Good Governance)

ooooo

# DINAMIKA SOSIAL DAN LINGKUNGAN P. JAWA

ARIEF YUWONO
STAF AHLI MENTERI SOSIAL BUDAYA
KEMENTERIAN